



**PERAN PENDAMPING DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN
SEMARANG TENGAH**

skripsi

**disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Nonformal**

UNNES
oleh
Evi Rahmawati
1201411045
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN PENDIDIKAN NONFORMAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

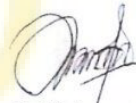
2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah**", ini benar-benar merupakan karya saya sendiri yang saya hasilkan melalui proses observasi, penelitian, dan bimbingan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Semua kutipan baik langsung maupun tidak langsung telah disertai keterangan identitas sumbernya dengan cara yang sebagaimana lazim dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala resiko terhadap keaslian karya saya ini.

Semarang, Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Evi Rahmawati
1201413087

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan sidang skripsi pada:

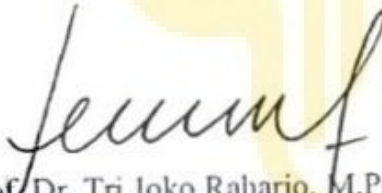
Hari : Jum’at

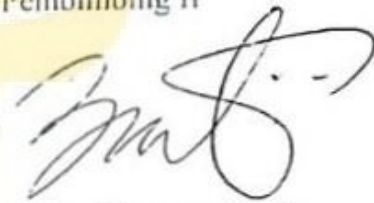
Tanggal : 28 Juli 2017

Mengetahui

Pembimbing I



Pembimbing II


Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd
NIP.195903011985111001


Bagus Kisworo, M.Pd
NIP.197911302006041005

UNNES

Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah



Dr. Utsman, M.Pd
NIP.195708041981031006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah" ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Univeritas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Agustus 2017

Panitia Ujian



Ketua
Dra. Senta Saraswati, M.Pd.,Kons
NIP. 196006051999032001

Sekretaris

Dr. Tri Suminar, M.Pd
NIP. 196705261995122001

Penguji Utama

Dra. Liliek Desmawati, M.Pd
NIP. 195912011984032 002

Penguji/Pembimbing I

Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd
NIP. 19590301 198511 1 001

Penguji/Pembimbing II

Bagus Kisworo, M.Pd
NIP. 197911302006041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu dalam melayani orang lain”. (Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Ahmad Hamzah, Ibu Darti, kakak Muhammad Ichsan dan Muhammad Ichwan, Adik Mahawi Lailatul Mukaromah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat.
2. Sahabatku Reza, Anisa, Sima, Nadia, Desi, Sakti, Hardi, Ruli yang selalu memberikan nasihat dan dukungan.
3. Teman-teman jurusan PLS angkatan 2013 yang telah berjuang bersama.
4. Sekretariat Program Keluarga Harapan beserta pendamping PKH yang telah memberikan saya kesempatan dan menerima di tengah-tengahnya.
5. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNNES.
6. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah”.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tersusunnya skripsi ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata, namun juga berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd, Dekan FIP UNNES yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Dr. Utsman, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
3. Prof. Dr. Tri Joko Rahardjo, M.Pd dan Bagus Kisworo, M.Pd. dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Semua pihak dari Sekretariat Program Keluarga Harapan yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
5. Sahabat-sahabatku yang tak bisa aku sebutkan yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran-saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan.

Semarang, 28 Juli 2017

Evi Rahmawati
NIP. 1201413087

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Rahmawati, Evi. 2017. *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah*. Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Tri Joko Raharjo dan Bagus Kisworo, M.Pd.

Kata Kunci: Peran Pendamping, Program Keluarga Harapan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan serta faktor pendukung dan penghambat peran pendamping dalam pendampingan Program Keluarga Harapan. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan tentang peran pendamping dalam PKH dan (2) mendeskripsikan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pendampingan di Kecamatan Semarang Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 7 orang yaitu 1 koordinator PKH, 2 pendamping PKH, dan 4 penerima PKH. pendamping PKH. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori. Teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping memiliki empat peran yaitu : 1) peran keterampilan Fasilitatif, 2) peran keterampilan mendidik, 3) peran keterampilan representatif/ perwakilan masyarakat, dan 4) peran keterampilan teknis. Dalam pendampingan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor internal yang menjadi kendala dalam pendampingan adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data, dan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu. Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah penginformasian dari pusat yang sifatnya mendadak, jarak yang ditempuh pendamping ke tempat pendampingan cukup jauh dan lokasi tempat pendampingan yang berada di gang-gang sempit. Faktor pendukungnya adalah antusiasme penerima bantuan serta sarana yang memadai.

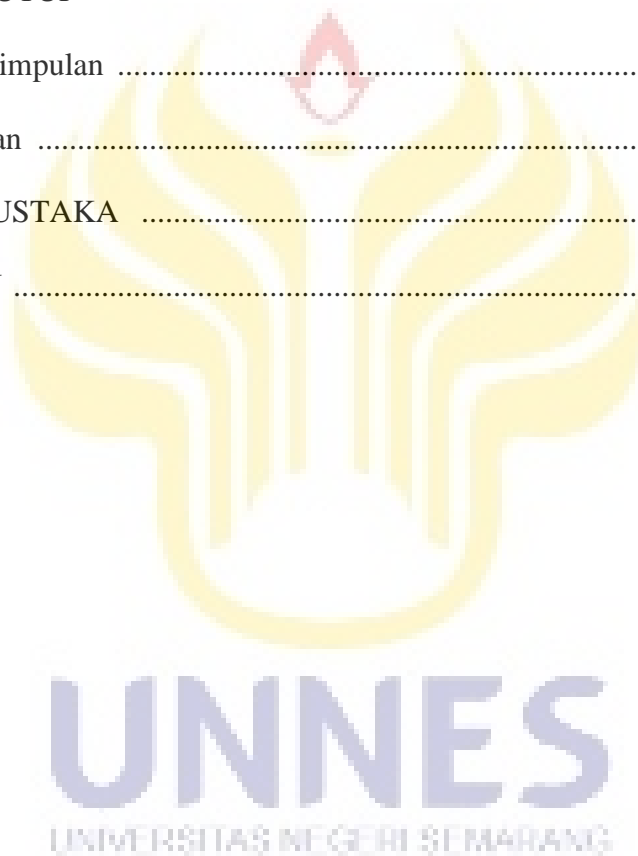
Simpulan dari penelitian ini yaitu pendampingan di Kecamatan Semarang Tengah berjalan sesuai dengan empat peran pendamping. Saran yang diberikan untuk PKH yaitu sebaiknya program ini terus ada dan segala kekurangan dapat diperbaiki. Serta memperbanyak jumlah pendamping dan untuk penempatan pendamping sebaiknya dekat dengan domisili pendamping agar pendampingan lebih efektif tidak terkendala oleh jauhnya tempat pendampingan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KELULUSAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah	7
1. 3 Tujuan Penelitian.....	7
1. 4 Manfaat Penelitian	7
1. 5 Penegasan Istilah	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Peran Pendamping	11
2.1.1 Pengertian Peran	11

2.1.2	Peran Pendamping	14
2.2	Pemberdayaan Masyarakat	23
2.2.1	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	23
2.2.2	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	25
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	27
2.3	Program Keluarga Harapan (PKH)	31
2.4	Kerangka Berfikir	38
BAB 3 METODE PENELITIAN		
3.1	Pendekatan Penelitian	42
3.2	Lokasi Penelitian	42
3.3	Subjek Penelitian	43
3.4	Fokus Penelitian	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data	43
3.6	Keabsahan Data	48
3.7	Analisis Data	50
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	54
4.1.1	Gambaran Lokasi Penelitian	54
4.1.2	Gambaran Umum PKH	55
4.1.3	Gambaran Subjek	59
4.1.4	Peran Pendamping	59
4.1.5	Evaluasi Pendamping	68
4.1.6	Faktor Penghambat Pendampingan	69

4.1.7 Faktor Pendukung Pendampingan	72
4.2 Pembahasan	72
4.3.1 Peran Pendamping	74
4.3.2 Faktor Penghambat Pendampingan	79
4.3.3 Faktor Pendukung	79
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Data Sumber	35
2. Subyek dan Informan Penelitian	59
3. Data Penerima Bantuan PKH.....	122
4. Daftar Nama Koordinator, Pendamping dan Operator PKH	128



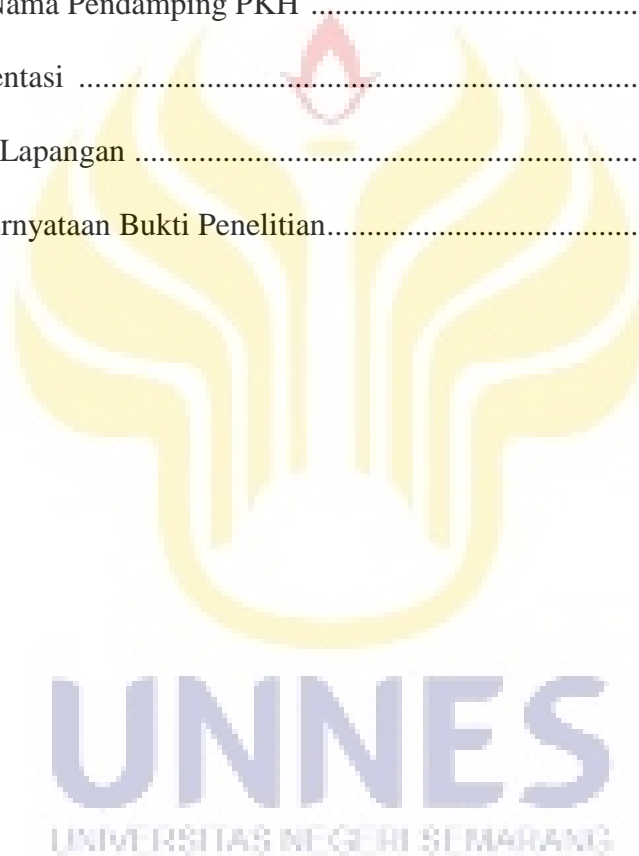
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Berpikir	41
2. Skema Analisis Data	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	89
2. Pedoman Wawancara	92
3. Data Penerima Bantuan PKH	122
4. Daftar Nama Pendamping PKH	128
5. Dokumentasi	134
6. Catatan Lapangan	144
7. Surat Pernyataan Bukti Penelitian.....	148



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Masalah Masalah kemiskinan menjadi masalah yang rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendiri. Mayoritas masyarakat Indonesia berada pada taraf ekonomi yang rendah, hal ini menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah tinggi dari tahun ke tahun. Dengan kondisi seperti ini membuat Indonesia menghadapi persoalan-persoalan rumit seperti tingkat kriminalitas tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. Masalah seperti ini sering terjadi di sebuah Negara yang penduduknya besar. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Banyak sekali penduduk Indonesia saat ini yang masih hidup dalam keadaan miskin dan bahkan sangat miskin, yang membuat mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Kemiskinan itu merupakan

sebuah konsep yang amat relatif sehingga amat sulit didefinisikan. beberapa diantara mereka menuliskan juga definisi kemiskinan itu.

Sementara menurut Sumarnonugroho (1984:12), kemiskinan itu sendiri mempunyai pengertian yang relatif. Pada dasarnya kemiskinan itu tidak saja berupa kemiskinan secara ekonomi (yang menunjuk kepada anggota atau sekelompok masyarakat yang mengalami keadaan hidup tertentu sehingga tidak mampu memperbaiki diri untuk mencapai standar kehidupan yang layak) tetapi juga kemiskinan secara emosional yang mempunyai pengertian khusus yaitu ditujukan bagi mereka yang mengalami keadaan hidup tertentu dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (www.bps.go.id) pada maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskian) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10.86 persen), berkurang sebesar 0.50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada maret 2016. Sementara presentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 14, 09 persn pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada maret 2016. Selama periode September 2015-maret 2016, , jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada maret 2016), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orag pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada maret 2016).

Sementara berdasarkan Badan Pusat Statistik kota Semarang (www.semarangkota.bps.go.id), angka kemiskinan di Kota Semarang masih relatif tinggi walaupun sebenarnya dari tahun ketahun jumlah presentasinya semakin menurun. Hasil verifikasi dan identifikasi warga miskin Kota Semarang Tahun 2015 diperoleh data warga miskin Kota Semarang sebesar 114.939 KK / 367.848 jiwa dengan rincian warga sangat miskin sebesar 39 KK / 105 jiwa, warga miskin sebesar 17.336 KK / 54.485 jiwa dan warga hampir miskin sebesar 97.564 KK / 313.258 jiwa. Prosentase warga miskin Kota Semarang jika dibandingkan dengan warga Kota Semarang per tanggal 30 april 2015 sebanyak 1.764.405 adalah sebesar 20,85%. Jika dibandingkan dengan data hasil Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2013 terdapat Penurunan jumlah warga miskin sebesar 6.130 jiwa. Secara keseluruhan ada penurunan 0,64%, dimana pada pendataan Tahun 2013 menunjukkan bahwa 21,49 % penduduk Kota Semarang tergolong miskin dan dari Hasil Sementara Tahun 2015 menunjukkan bahwa 20,85 % penduduk Kota Semarang tergolong miskin.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen

Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Dalam bentuk Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat guna meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

Menurut Rahayu, (2012:128) Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian uang tunai kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya, PKH difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS sebagai target peserta.

PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu. Tujuan dari program ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Sasaran peserta PKH adalah Keluarga Miskin (KM) dan yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak 7 - 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia diatas 70 tahun.

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan PKH. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat Kecamatan. keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) dan peran pendamping. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas dan tanggungjawab pendamping PKH secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Selain tugas tersebut, pendamping juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.

Menurut Indrayani (2014 :11), pendamping memiliki tugas untuk memberi informasi kepada RTSM penerima PKH, melakukan pendampingan dan memberikan informasi kepada setiap kota atau kecamatan, memberikan pemahaman mengenai pemahaman dan tujuan PKH, prosedur dan mekanisme PKH, hak dan kewajiban penerima PKH, syarat penerima PKH, dan manfaat PKH di wilayah tempat ia bertugas.

PKH merupakan program dari pemerintah yang pelaksanaannya pun masih belum melalui proses dan tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Selain manajemen yang baik, peran pedamping sangat perlu diperhatikan dalam program ini, karena melalui pendampingan yang baik dapat diketahui seberapa tolak ukur pencapaian program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping PKH di kecamatan Semarang Tengah adalah memberikan informasi dan penjelasan mengenai prosedur yang harus dilalui seperti, validasi data peserta, memberikan motivasi, memberikan pendampingan kepada peserta PKH agar melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan menjembatani peserta PKH dengan pihak atau lembaga lain yang terlibat di kecamatan maupun kabupaten atau kota serta membuat laporan bulanan dan tahunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Indrayani yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian, peran pendamping dalam PKH adalah untuk mengupayakan agar masyarakat mempunyai keberdayaan diri dalam membangun, mengembangkan, dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Oleh karena itu pendampingan dalam PKH sangat penting bagi penerima PKH. Pengentasan Kemiskinan melalui PKH akan bergantung pada peran dan fungsi pendamping dari berbagai program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah mendefinisikan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut kemudian penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang dapat dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana peran pendamping melalui program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Tengah ?
- 1.2.2 Apa faktor pendukung dan penghambat peran pendamping dalam pendampingan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan peran pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Tengah
- 1.3.2 Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat peran pendamping dalam pendampingan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan nonformal tentang peran pendamping program keluarga harapan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan Semarang Tengah.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi masyarakat dapat mengetahui pemberian program keluarga harapan kepada masyarakat RTSM dapat mempengaruhi tingkat kualitas hidup manusia.

1.4.2.2 Bagi pemerintah dapat mengetahui bahwa dengan adanya pendamping dapat membantu berjalannya program keluarga harapan yang baik dapat mencapai keberhasilan program dengan peningkatan kualitas hidup manusia yang lebih baik.

1.4.2.3 Bagi jurusan pendidikan nonformal dapat memberikan wawasan baru bahwa program pendidikan nonformal yang digalakkan secara nasional oleh pemerintah adalah program keluarga harapan, tentunya sebagai praktisi pendidikan nonformal dapat membantu keberlangsungan program ini baik secara manajemen maupun praktik serta dapat dipelajari lebih lanjut melalui mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan Sosial.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan memudahkan pemahaman, maka perlu adanya penjelasan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Peran

Menurut Soekanto, (1987:221) peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya. Yang dimaksud dalam peran ini adalah peran dari pendamping PKH.

1.5.2 Pendamping

Menurut Huraerah, (2011:50) Pendamping atau pekerja sosial adalah praktikan pekerjaan sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

Pendamping yang dimaksud adalah pendamping dari PKH di Kecamatan Semarang Tengah

1.5.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suparjan (2003:36), secara prinsip pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan sebuah komunitas atau masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.

1.5.4 Miskin

Menurut Ath-thawil dalam bagir (1985:36) kemiskinan dikenal sebagai tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok.

1.5.5 Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Rahayu, (2012:128) Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian uang tunai kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya, PKH difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS sebagai target peserta. PKH yang dimaksud adalah PKH yang berjalan di kecamatan Semarang Tengah.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peran Pendamping

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Sarwono (2014:215) teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Menurut Biddle & Thomas dalam Sarwono (2017:215) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: (a) orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. (b) perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. (c) kedudukan orang-orang dalam perilaku. (d) kaitan dan perilaku.

Sedangkan menurut Mayor Polak dalam Sarwono (2011:41) menyebutkan peranan menjadi 2 hal : 1) Peranan menunjuk pada aspek dinamis dari status. 2) Peranan secara umum menunjuk pada keseluruhan peranan itu dan menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat itu.

Menurut Linton dalam Syam (2014:71) menggambarkan teori peran sebagai interaksi sosial di dalam lingkungan tertentu yang sudah ditetapkan oleh

budaya. Sesuai dengan teori ini, peranan menuntun kita untuk berperilaku di kehidupan sehari-hari. Maksudnya perilaku ditentukan oleh peran.

Horoepoetri dkk (2003:79) menyebutkan beberapa dimensi peran sebagai berikut: 1) Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 2) Peran sebagai strategi, penganut paham ini mengatakan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. 5) Peran sebagai terapi. Peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Elder dalam Sarwono (2002:89), Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya. Diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai peran tersebut. Seseorang yang menjadi dokter jadi harus

mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya.

Menurut Ahmadi (2009:106) peran adalah kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan situs dan fungsi sosialnya. Misalnya dalam lapangan perusahaan, peranan sosial dan pemimpin perusahaan ditentukan oleh pengharapan-pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai seorang pemimpin perusahaan. Sedangkan menurut Boeree (2010:123) peran adalah harapan bersama yang menyangkutkan fungsi-fungsi di tengah masyarakat. Terdapat berbagai jenis peran, dan beberapa diantaranya bersifat formal, di tengah-tengah kelompok yang lebih besar (organisasi dan masyarakat), peran-peran formal ini menyanggah gelar-gelar tertentu dan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana harapan masyarakat.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa peran adalah bentuk dari perilaku seseorang yang dijalankan sesuai dengan kedudukan atau statusnya yang merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

2.1.2 Peran Pendamping

Pendamping menurut Direktorat Bantuan Sosial, (2007:4) pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Menurut Departemen Sosial RI, (2009:122) pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, pendampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Menurut Susanto (2014:77) Pendamping pengembangan masyarakat adalah orang yang terkategori sebagai pengantar perubahan (*agent of change*), baik yang berada di dalam sistem sosial masyarakat (*insider change agents*)

maupun yang berada di luar sistem sosial masyarakat bersangkutan (*outsider change agents*).

Menurut Suharto (2005:93) Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disertai kegiatan pendampingan. Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang dimaksud peran pendamping adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial.

Ada beberapa undang-undang yang secara langsung mengakui dan mengatur adanya keberadaan pekerja sosial. Diantaranya Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau

pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (14) yang dimaksud pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya. Menurut Kepmensos No.10/HUK/2007, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan sosial.

Menurut Huraerah, (2011:50) pekerja sosial adalah praktikan pekerjaan sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

Sedangkan menurut Wibhawa, (2010:52) pekerja sosial adalah orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial.

Menurut Damanik, (2008:16-17) menyebutkan tujuan pekerjaan sosial meliputi :

- 1) meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan masalah-masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan, dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, pekerja sosial mengakses hambatan-hambatan yang membatasi kemampuan klien untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pekerja sosial juga mengidentifikasi sumber-sumber dan kekuatan-kekuatan, meningkatkan keterampilan-keterampilan untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, mengembangkan rencana-rencana pemecahan masalah, dan mendukung usaha-usaha klien untuk menciptakan perubahan-perubahan didalam kehidupan dan situasi-situasi mereka
- 2) menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang dibutuhkan. Pada satu sisi, pencapaian tujuan ini berarti membantu klien melokasikan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi-situasi mereka secara lebih efektif. Pada sisi lain , pekerja sosial mengadvokasi kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan yang memberikan manfaat secara optimal, memperbaiki komunikasi diantara karyawan badan-badan sosial yang mewakili berbagai program dan pelayanan, dan mengidentifikasi jurang-jurang dan kendala-kendala dalam pelayanan-pelayanan sosial yang harus dialamatkan
- 3) memperbaiki jaringan penyelenggaraan pelayanan sosial. Tujuan ini berarti bahwa pekerja sosial harus menjamin agar sistem yang menyelenggarakan pelayanan-pelayanan sosial manusiawi dan memberikan secara memadai sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan kepada klien. Untuk mencapai tujuan ini, pekerja sosial mendorong perencanaan yang berpusat pada klien,

mendemonstrasikan efektivitas dan efisiensi, dan menggabungkan ukuran-ukuran akuntabilitas

4) mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Pekerja sosial menguji isu-isu sosial yang berimplikasi pada kebijakan sosial. Pekerja sosial mengajukan saran-saran bagi kebijakan-kebijakan baru dan bagi pencabutan kebijakan-kebijakan yang tidak lagi produktif. Selain itu, pekerja sosial menerjemahkan kebijakan-kebijakan umum ke dalam program-program dan pelayanan-pelayanan yang tanggap secara efektif terhadap kebutuhan-kebutuhan klien.

Sedangkan menurut Pincus dan Minahan dalam Hermawati, (2001:13) merumuskan tujuan pekerjaan sosial sebagai berikut: 1) meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, 2) mengaitkan orang dengan sistem yang dapat menyediakan sumber pelayanan dan kesempatan yang dibutuhkan, 3) meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem tersebut secara efektif dan berperikemanusiaan, 4) memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, serta perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.

Berdasarkan keempat tujuan tersebut berkaitan erat dengan pengertian pekerjaan sosial itu sendiri yang merupakan suatu bidang keahlian atau profesi yang bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang sehingga orang tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, dapat mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dihadapi dan dapat membantu orang mencapai kesejahteraan.

Menurut Hermawati (2001:15) untuk mencapai tujuan tersebut, pekerjaan sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1) membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara lebih efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah mereka; 2) mengaitkan orang dengan sistem sumber; 3) mempermudah interaksi, mengubah, dan menciptakan hubungan baru antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan; 4) mempermudah interaksi, mengubah, dan menciptakan relasi antar orang di lingkungan sistem sumber; 5) memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, serta perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial; 6) meratakan sumber-sumber material; 7) bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial

Berdasarkan teori tersebut, pekerjaan sosial bukan hanya meninjau masalah sebagai masalah perorangan semata, melainkan juga mempertimbangkan situasi sosial di tempat orang itu berada dan terlibat, serta mengaitkan orang tersebut dengan sistem sumber dan kebijakan sosial. Dengan demikian, orang itu benar-benar dapat menjalankan tugas kehidupan dan fungsi sosialnya dengan baik, dapat memecahkan permasalahan dengan baik, serta dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Menurut Habibullah dalam Ife (2011:101-116) Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Peran pendamping PKH berdasarkan konsep peran *community worker* adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Peran dan keterampilan fasilitatif.

Peran yang berkaitan dengan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini adalah menjadi model, melakukan negosiasi dan mediasi, memberikan dukungan, membangun consensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

2.1.2.2 Peran dan keterampilan mendidik.

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

2.1.2.3 Peran dan keterampilan representasi/ perwakilan masyarakat.

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi nama kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

2.1.2.4 Peran dan keterampilan teknis.

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melakukan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti : melakukan riset,

penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

Menurut Pujileksono dalam Asquith dkk (2015:162) pekerja sosial memiliki peran sebagai berikut : 1) konselor yang bekerja dengan individu untuk membantu mengatasi masalah pribadi; 2) advokat atas nama orang miskin dan marjinal secara sosial; 3) partner bekerja sama dengan yang kurang beruntung atau individu dan kelompok yang tidak berdaya; 4) penilai resiko atau kebutuhan untuk sejumlah kelompok klien, juga terkait dengan pengawasan; 5) manajer perawatan yang mengatur layanan bagi pengguna layanan, tetapi memiliki sedikit kontak dengan klien secara langsung; 6) agen kontrol sosial yang membantu untuk mempertahankan sistem sosial terhadap tuntutan individu yang perilakunya bermasalah.

Sedangkan menurut Kusuma (2014:211-224), Terdapat 10 peran pendamping, peran-peran tersebut adalah: 1) Pembela (*advocacy*), 2) Fasilitator, 3) Pemungkin (*enabler*), 4) Penjangkauan (*outreacher*), 5) Pembimbing (*supervisor*), 6) Penggerak (*dinamisator*), 7) Pemotivasi (*motivator*), 8) Katalisator, 9) Mediator, 10) Elaborator.

Menurut Nasdian (2014:75) dalam konteks pengembangan masyarakat, pendampingan haruslah berdasarkan pada pemahaman terhadap komunitas tersebut. Untuk itu, perlu diketahui siapa dalam komunitas tersebut yang akan didampingi karena berkenaan dengan kebutuhan memfasilitasi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga pilihan pendekatan yang akan dilakukan, yakni: 1) pendekatan menolong diri sendiri (*self-help*), masyarakat menjadi partisipan yang

berarti dalam proses pembangunan dan melakukan kontrol dalam kegiatan pengembangan komunitas. (2) pendampingan teknik (*technical assistance*), adalah pendampingan teknik, yang didasarkan pada perkiraan kebutuhan oleh para perencana yang dapat mengantarkan dan mengevaluasi proses pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat dari perspektif ini bersifat spesifik mencakup pengembangan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan. dan (3) pendekatan konflik, yaitu menekankan pada usaha-usaha meniadakan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain adalah baik juga untuk dilakukan olehnya.

Berdasarkan teori tersebut, indikator pendamping dikatakan baik adalah ketika sudah melaksanakan tugas pendampingan sesuai dengan petunjuk teknis di dalam PKH, diantaranya yaitu tugas memberikan pengarahan pada pertemuan awal mengenai prosedur yang harus dilalui dalam PKH, mendampingi proses pembayaran, berdiskusi dalam kelompok, pendampingan rutin, berkunjung ke rumah penerima manfaat, memfasilitasi proses pengaduan, mengunjungi penyedia layanan, melakukan konsolidasi, mengikuti bimtek dan rakor serta membuat laporan.

Sebuah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Panji mahasiswa jurusan Kesejahteraan Universitas Indonesia, mengatakan bahwa PKH dapat berjalan sebagai mana mestinya harus lebih banyak pendamping yang diterjunkan agar program berjalan seimbang dengan keinginan pendamping dan masyarakat. Posisi pendamping menurut panji sangat vital untuk keberhasilan pelaksanaan PKH. Panji menambahkan, bahwa fakta membuktikan program intervensi yang

mengelontorkan uang tunai berpotensi tidak efektif jika tidak dilakukan pengawasan yang ketat. Menurutya, karena tugas mengawal program di lapangan, pendamping harus benar-benar kapabel dan berintegritas moral yang tinggi. Terlebih dalam menjalankan tugas mereka digaji oleh Negara dengan besaran yang relatif memadai. Pendamping yang direkrut dari masyarakat harus menjadi pengaman aliran dana intensif sekaligus seorang kreator dan inovator untuk kemajuan RTSM peserta PKH.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soetomo (2015:88), unsur utama dari pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal.

Unsur terpenting dalam meraih keberhasilan pengembangan dalam masyarakat disamping modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia menjadi modal yang sangat penting. Modal manusia atau sumber daya manusia adalah unsur modal seperti rasa saling percaya sesama anggota masyarakat, empati sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama. Oleh karena itu diperlukan penguatan terhadap sumber daya manusia. Saat ini di Indonesia telah berjalan suatu program pemberdayaan masyarakat dan pendamping sosial sebagai pelengkap adanya pemberdayaan masyarakat.

Menurut Alwi, dkk, (2001:241) kata “berdaya” diartikan sebagai kontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan seseorang kekuatan untuk melakukan sesuatu atau membuat seseorang layak. Sedangkan secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuatan. Menurut Kindervater dalam Kusnadi, dkk (2005:220), pemberdayaan adalah proses peningkatan kemampuan seseorang baik dalam arti pengetahuan, keterampilan, maupun sikap agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

Menurut Djohani dalam Kusnadi, dkk (2005: 220), menyebutkan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Sedangkan menurut Prijono dan Pranarka (1996: 74), pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah kondisi dimana mereka memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan.

Menurut Sunartiningsih (2004: 140), menyebutkan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu: 1) Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya. 2) Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki. 3) Meningkatkan kualitas hidup anggota. 4) Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat. 5) Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Sedangkan menurut Suharto (2005: 60), tujuan dari pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah

perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu membuat masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Menurut Karsidi (1998:71) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut: 1). belajar dari masyarakat, 2) pendamping sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku, 3) saling belajar, saling berbagi pengalaman.

Berdasarkan prinsip pendampingan masyarakat tersebut, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendamping. Pendamping atau petugas pemberdayaan masyarakat berperan sebagai *outsider people*, yang dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampaian informasi. Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran langkah-langkah yang dilakukan, adalah: 1) Identifikasi

Potensi, 2) Analisis Kebutuhan, 3) Rencana Kerja Bersama, 4) Pelaksanaan Program Kerja Bersama, 5) Monitoring dan Evaluasi.

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Menurut Sunyoto (1998:126) Konsep kemiskinan absolute dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkret. Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan, papan). Masing-masing Negara mempunyai batasan kemiskinan absolute yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan. Artinya bahwa kemiskinan tersebut dilihat dari kondisi dimana masyarakat itu berada. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan, pemerintah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu: 1) Mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, 2) Melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan kesemua daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk

uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.

Menurut Sunartiningsih (2004: 80), Kemiskinan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perubahan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Yasa (2008: 86-91) Banyak faktor yang berperan menjadi penyebab kemiskinan, diantaranya adalah : 1) Ketidakberuntungan (*disadvantages*) yang melekat pada keluarga miskin, 2) keterbatasan kepemilikan aset (*poor*), 3) kelemahan kondisi fisik (*physically weak*), 4) keterisolasian (*isolation*), 5) kerentanan (*vulnerable*), dan 6) ketidakberdayaan (*powerless*) adalah berbagai penyebab mengapa keluarga miskin selalu kekurangan dalam memenuhi dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan layak untuk anak-anaknya. Kondisi kemiskinan juga menjadi diperparah karena kewajiban sosial yang ditanggung keluarga miskin, seperti kewajiban menyumbang. Situasi yang seperti ini menyebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya

Menurut Sudjana (2004: 270) Strategi dalam pengentasan kemiskinan banyak ditawarkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan program kecakapan vokasional bagi masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat mengandung arti sebagai usaha sadar, sistematis, dan terarah yang diselenggarakan oleh, untuk dan dalam masyarakat yang bertujuan mengubah taraf kehidupan mereka sendiri ke arah yang lebih baik.

Banyak program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang dinilai masih kurang berhasil untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Sukidjo (2009:154-164) bahwa meskipun sudah banyak program untuk menanggulangi kemiskinan dari pemerintah, disadari program tersebut kurang berhasil. Hal ini disebabkan kemiskinan hanya dilihat berdasarkan dari aspek ekonomi dan menekankan aspek pemberdayaan serta kurang melibatkan masyarakat lokal. Padahal kemiskinan dapat dilihat berdasarkan: 1) Pendekatan pendapatan (*income approach*); 2) Pendekatan kebutuhan dasar (*basics needs approach*); 3) Pendekatan aksesibilitas (*accessibility approach*); 4) Pendekatan kemampuan manusia (*human capability approach*); 5) Pendekatan ketimpangan (*inequality approach*). Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, dapat dilakukan melalui proses pembelajaran sebagai berikut: (a) penciptaan iklim, (b) penguatan kelembagaan, (c) penguatan potensi, dan (d) perlindungan.

Menurut Silkhondze dalam Karsidi (2007: 136-145), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai

outsider people dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampaian informasi.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan sebagai standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tolak ukur umum yang digunakan adalah tingkat pendapatan per waktu kerja, kebutuhan relatif per keluarga termasuk untuk sandang, pangan, papan.

Untuk mengatasi kemiskinan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting mengingat bahwa masyarakat miskin tidak selalu dipandang rendah karena mereka juga bisa diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai Pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung.

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja ini berperan sebagai pendamping sosial.

2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.3.1 Konsep PKH

Jones dalam Arif Rohman (2009:101) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen, Pendidikan Nasional, Departemen Agama Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Dengan PKH diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin penerima bantuan (selanjutnya disebut RTSM) memiliki akses yang baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan

dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterangisan sosial yang selama ini melekat pada warga miskin.

Berdasarkan data dari Kementrian Sosial (www.kemsos.go.id) Sasaran peserta PKH adalah Keluarga Miskin (KM) dan yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7 - 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia diatas 70 tahun.

Sedangkan menurut Fernald dalam *Role Of Cash Conditional Cash Transfer Programmes For Child Health, Growth, And Development: An Analysis Of Mexico's Oportunidades* (2008:371)

“CCT programmes, however, families receive a cash payment only if they comply with a set of certain requirements. For example, most CCT programmes distribute benefits conditional on mandatory attendance at preventive health-care service and health and nutrition education sessions designed to promote positive behavioural changes, and some programmes also require school attendance for school-age children. In other CCT programmes, fortified food or micronutrient supplements are distributed to vulnerable subgroups in the population (eg. Pregnant women and young children), which is conditional on the same factors as the cash transfer”.

Conditional Cash Transfer (CCT) adalah memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga miskin hanya jika mereka mematuhi seperangkat persyaratan tertentu. Misalnya sebagian besar program CCT mendistribusikan bantuan tergantung pada kehadiran wajib di pelayanan kesehatan preventif dan kesehatan gizi serta pendidikan yang dirancang untuk mempromosikan perubahan perilaku positif, dan beberapa program juga memerlukan kehadiran di sekolah untuk siswa

usia sekolah. Dalam CCT kesehatan gizi juga dikedepankan untuk kelompok rentan (misalnya, ibu hamil dan anak-anak), yang merupakan komponen dalam penerima CCT. Hal tersebut adalah syarat dari agar dapat menerima uang tunai dari program.

Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen pendidikan yang mensyaratkan anak-anak peserta PKH terdaftar dan hadir di sekolah minimal kehadirannya 85% dari jumlah hari efektif sekolah yang berlaku, komponen kesehatan dengan kewajiban antara lain peserta mendapatkan layanan prenatal dan postnatal, proses kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, melakukan imunisasi sesuai jadwal, dan memantau tumbuh kembang anak secara teratur dengan minimal kehadirannya 85% dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun atau lebih.

2.3.2 Tujuan PKH

Menurut Kementerian Sosial (2016:18), Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan khusus PKH adalah untuk meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, meningkatkan kualitas kesejahteraan peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH, mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial dan memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial.

Sedangkan menurut Rahayu (2012:130), tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan merubah perilaku RTSM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *millennium development goals* (MDGs). Sedangkan secara khusus, tujuan PKH adalah : 1) meningkatkan status sosial ekonomi RTSM, 2) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari keluarga sangat miskin (KSM), 3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM, serta 4) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.

2.3.3 Dana Bantuan PKH

Menteri Sosial Kholifah Indar (www.nasional.kompas.com) menjelaskan bahwa pada tahun 2017 dana yang dialokasikan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 11,4 triliun. Bantuan PKH akan disamakan sebesar Rp.1.900.00 per tahun dengan penyaluran empat kali dalam setahun. Penyaluran pertama sebesar Rp.500.000, kedua Rp.450.000, ketiga Rp.500.000 dan keempat Rp.450.000.

Ketentuan bantuan PKH adalah sebagai berikut: 1) Bantuan tetap sebagaimana SK Menteri Sosial No. 23/HUK/2016 berlaku dalam satu tahun. 2) Bantuan komponen peserta PKH diberikan kepada maksimal 3 anggota keluarga sesuai criteria kepesertaan. 3) Bantuan komponen peserta PKH diberikan dengan jumlah nominal terbesar dari komponen kepesertaan. 4) Bantuan komponen

kesehatan kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan.

Berikut adalah indeks besaran dana yang di terima peserta PKH

NO.	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN
1.	Bantuan tetap	500.000
2.	Bantuan Ibu hamil dan menyusui	1.200.000
3.	Bantuan anak usia di bawah enam (6) tahun	1.200.000
4.	Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat	450.000
5.	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTs atau sederajat	750.000
6.	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	1.000.000
7.	Bantuan penyandang disabilitas berat	3.100.000
8.	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	1.900.000

2.3.4 Manfaat PKH

Menurut Rahayu (2012:131) dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat PKH adalah :

2.3.4.1 dalam jangka pendek yaitu memberikan *income effect* melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin,

2.3.4.2 dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RTM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) dan memberikan kepastian akan masa depannya (*insurance effect*),

2.3.4.3 merubah perilaku keluarga miskin yang relative kurang mendukung

peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan, dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dan lain-lain) dan *opportunity cost* (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada sekolah),

2.3.4.4 mengurangi pekerja anak, yaitu mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah RTM menjadi tuna sosial dan/ penyandang masalah kesejahteraan sosial,

2.3.4.5 peningkatan kualitas pelayanan publik melalui *complementary* perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan (supply side), pengembangan system perlindungan sosial masyarakat miskin (demand side), sekaligus penguatan desentralisasi, serta

2.3.4.6 percepatan pencapaian MDGs melalui indikator kemiskinan, pendidikan, ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.

2.3.5 Kewajiban Peserta PKH

Menurut Kementerian Sosial (2016:21) terdapat beberapa kewajiban peserta PKH yaitu diantaranya:

2.3.5.1 Ibu hamil/nifas : Pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali dalam 3 kali trisemester, Melahirkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan

2.3.5.2 Bayi dan Balita : Usia 0-11 bulan, imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan; Usia 6-11 bulan, mendapat suplemen vit A; Usia 1-5 tahun, imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan setiap bulan; Usia 5-6

tahun, pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan vit A sebanyak 2 kali dalam setahun; Usia 6-7 tahun, timbang badan di fasilitas kesehatan

2.3.5.3 Anak sekolah : Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD,SMP,SMA); Terdaftar di sekolah/ pendidikan kesetaraan; Minimal 85% kehadiran dikelas

2.3.5.4 Penyandang Disabilitas Berat : Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan; Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (home care)

2.3.5.5 Lansia Miskin diatas 70 tahun : Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia); Mengikuti kegiatan sosial (day care dan home care)

2.3.6 Sanksi Peserta PKH

Menurut Kementrian Sosial (2016:22) Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

2.3.6.1 Pengurangan bantuan adalah 10% setiap bulannya sebelum penyaluran periode berikutnya

2.3.6.2 Peserta tidak mendapat bantuan jika seluruh komponen anggota tidak memenuhi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut

2.3.6.3 Peserta PKH yang seluruh komponen anggotanya dalam 6 bulan berturut turut tidak memenuhi komitmen maka disamping bantuan tidak di berikan, maka ia akan dikeluarkan

2.3.7 Sanksi bagi Pendamping

Bagi pendamping yang peserta PKH dampungannya tidak memenuhi kondisionalitas akan diberikan sanksi berupa:

2.3.7.1 Mendapat teguran secara lisan maupun tertulis (SP-1 sampai SP3)

2.3.7.2 Penundaan pembayaran honorarium

2.3.8 Pendampingan

Menurut Kementerian Sosial (2016:28) Pendampingan komponen kesehatan dan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

2.3.8.1 Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan peserta PKH dampungannya

2.3.8.2 Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan sampai pada sasaran.

2.3.9 Syarat Pendamping PKH

Persyaratan Umum sebagai pendamping PKH adalah sebagai berikut:

2.3.9.1 Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI;

2.3.9.2 Siap dan bersedia bekerja penuh waktu serta ditempatkan pada wilayah sesuai dengan kebutuhan PKH;

2.3.9.3 Tidak berkedudukan sebagai pengurus, anggota dan atau berafiliasi partai politik;

2.3.9.4 Tidak pernah dan atau tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata;

2.3.9.5 Usia minimal 19 (sembilan belas) tahun maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada bulan April 2016;

2.3.9.6. Bebas dari narkoba dan Zat Adiktif lainnya;

2.3.9.7. Sehat Jasmani dan Rohani;

2.3.9.8. Lulusan Perguruan Tinggi atau Sekolah yang program studinya terakreditasi bagi pendidikan Sarjana, Diploma, dan SMK;

2.3.9.9. Tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain;

2.3.9.10. Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan office automation;

2.3.9.11. Bersedia menandatangani Pakta Integritas apabila terpilih menjadi Pendamping dan Operator PKH tahun 2016;

2.3.9.12. Mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Persyaratan Khusus untuk Posisi Pendamping PKH Meliputi :

a) Pendidikan Diploma IV/Sarjana Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial : 1) Mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2) Memiliki pengalaman praktek pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.

b) Pendidikan Sarjana dan Diploma di Bidang ilmu-ilmu sosial terapan diutamakan : 1) Mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2) Memiliki pengalaman praktek pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.

c) Pendidikan Sarjana atau Diploma di Bidang sosial, diutamakan: 1) Mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial/Kesejahteraan Sosial; 2) Memiliki pengalaman praktek pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.

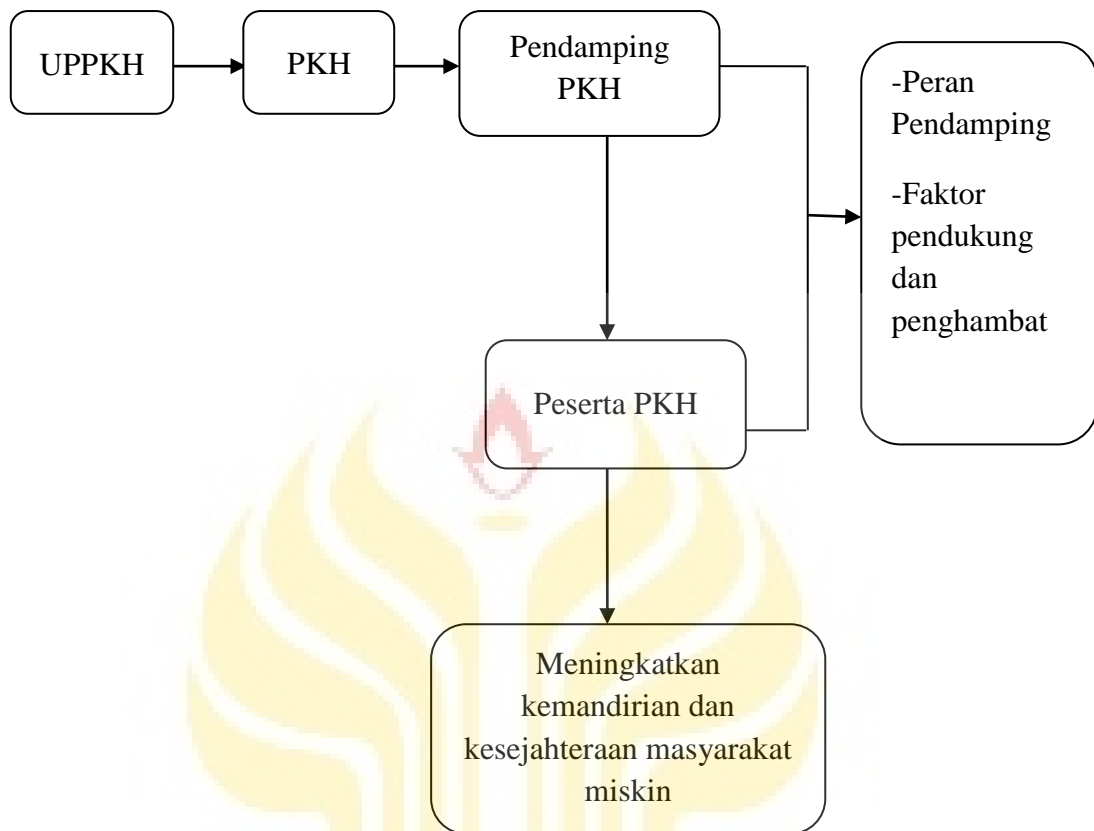
d) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial/Keperawatan, diutamakan : 1) Mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan

sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;2) Memiliki pengalaman praktek pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah kerangka konseptual peneliti yang akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka berfikir ini berisi konsep atau variabel yang terkait dengan masalah penelitian. Berikut gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini:





Bagan 2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir di atas menjelaskan bahwa Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) merupakan kunci untuk mensukseskan pelaksanaan PKH dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara UPPKH Kecamatan, UPPKH Kabupaten atau Kota dengan UPPKH Pusat serta Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten atau Kota. PKH dikelola oleh UPPKH yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. Peserta PKH adalah RTSM yang memerlukan tenaga pendampingan. Pendamping bekerja dibawah pengawasan UPPKH. Pendamping PKH direkrut oleh UPPKH melalui seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan masyarakat penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH.

BAB 5

PENUTUP

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran Pendamping dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah” yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa peran pendamping terbagi menjadi empat diantaranya adalah: 1) Peran dan keterampilan fasilitatif. bahwa pendamping telah melakukan perannya sebagai fasilitator dengan membantu memberi informasi, motivasi serta membantu pengorganisasian peserta PKH yang sangat dibutuhkan untuk peserta PKH. 2) pendamping telah memenuhi perannya sebagai pendidik. Hal yang dilakukan pendamping sebagai pendidik yaitu pada saat pertemuan kelompok Family Development Session (FDS) 3) Peran dan keterampilan representasi/ perwakilan masyarakat. Pendamping telah menjalankan peran sebagai perwakilan masyarakat dengan mendatangi layanan-layanan eksternal seperti puskesmas, posyandu dan sekolah untuk kepentingan peserta PKH. Mengunjungi Penyedia Layanan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat vital dalam keberlangsungan maupun peningkatan mutu program. 4) Peran dan keterampilan teknis. Pendamping telah memenuhi peran keterampilan teknis. Karena sebelum penerjuran peserta mereka melakukan bimtek yang berisi tentang materi dan praktek lapangan dan pendamping di Kecamatan Semarang Tengah telah memenuhi peran tersebut

Pada pendampingan di Kecamatan Semarang Tengah juga menemui kendala-kendala. Faktor internal yang menjadi kendala dalam pendampingan adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data atau formulir pemutakhiran. Selain itu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu. Untuk pertama kali pendamping bekerja di tempat baru ada perasaan grogi namun akhirnya seiring berjalannya waktu grogi dapat teratasi. Serta sulitnya kehadiran peserta PKH untuk tepat waktu, bahkan banyak yang tidak hadir dengan alasan yang beragam. Padahal pendamping dan peserta sudah membuat kesepakatan namun tetap saja masih banyak yang melanggar tidak sesuai dengan komitmennya. Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah penginformasian dari pusat yang sifatnya mendadak yang menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal. Lalu jarak yang ditempuh pendamping ke tempat pendampingan cukup jauh dan terkadang terjebak macet yang menyebabkan tertundanya pendampingan. Serta lokasi tempat pendampingan yang berada di gang-gang sempit dan kurangnya tanda atau nama gang yang menyulitkan pendamping untuk mencari tempat pendampingan yang lokasinya berpindah pindah.

Selain faktor penghambat, ada pula faktor pendukung dalam proses pendampingan meliputi dukungan dari masyarakat penerima bantuan dan ibu-ibu yang rajin hadir. Serta alat bantu pendampingan berupa buku yang berisi materi yang sangat membantu dalam penyampaian Family Development Session (FDS).

1.2 Saran

5.2.1 Untuk Program Keluarga Harapan sangat bermanfaat untuk warga miskin karena selain memberikan bantuan tapi juga memberdayakan ibu-ibu untuk berusaha keluar dari garis kemiskinan. Serta melatih mental ibu-ibu dan memberikan perubahan sikap untuk lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Sebaiknya program ini terus ada dan segala kekurangan dapat diperbaiki. Serta Sebaiknya jumlah pendamping ditambah dan untuk penempatan pendamping sebaiknya dekat dengan domisili pendamping agar pendampingan lebih efektif tidak terkendala oleh jauhnya tempat pendampingan.

5.2.2 Untuk Pendamping PKH tetap semangat menjalankan pekerjaannya sebagai pekerja sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Usman, Sunyoto. 2015. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sumarnonugroho, T. 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : PT. Hanindita.
- Rahayu, Sri Lestari. 2012. *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung : Fokusmedia.
- Soekamto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, Sarlito. 2011. *Teri-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2017. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat, mungkinkah ada alternatifnya?*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Horoepotri, dkk. 2013. *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. Jakarta : Walhi.
- Sarwono, Sarlito. 1983. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syam, Nina W. 2014. *Psikologi Sosial sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Boeree, George. 2010. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Prismashopie.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hasan Alwi, dkk. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prijono, dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implentasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B, & Huberman, A. M. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan – Anggota IKAPI.
- Pujileksono, Sugeng. 2015. *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Perspektif Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. Malang : Setara Press.
- Hermawati, Istiana. 2001. *Metode Dan Teknik Dalam Praktik Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Jurnal :**
- Indrayani, Firma Kusuma (2014) Efektifitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Vol. 1 1-12. From : <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8901/baca-artikel>.
- Habibullah, (2011) Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang. Vol. 16 (2) 101-116. From : Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial).
- Kusuma, Nurnita Widya (2013) Peran Pendamping Dalam Program Pendampingan Dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Lingkungan

- Keluarga (Home Care): Studi Tentang Pendamping Di Yayasan Pitrah Sejahtera, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Vol 18 (2) 211-224. From : <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/36eec039702e6b91ec1fa1058bbcbca.pdf>.
- Karsidi, Ravik (2007) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Suarakarta Jawa Tengah). Vol. (3) 136-145. From : <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/2161>.
- Susanto, D (2010) Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat. Vol. 8 (1) 77-89. From : <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/5696/4324> .
- Sukidjo, (2009) Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri. Vol. 28 (2) 154-164. From : http://eprints.uny.ac.id/3723/1/6Strategi_Pemberdayaan.pdf .
- Usman, Claudio (2014) Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). Vol 02 (1) 1-13. From : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/4503/4032>.
- Fernald, Lia C H, et all. (2008) Role Of Cash Conditional Cash Transfer Programmes For Child Health, Growth, And Development: An Analysis Of Mexico's Oportunidades. Vol 371 828-37. From : www.scholar.google.com/conditionalcashtransfer.
- Panji, 2007 Program Keluarga Harapan Sebagai Pilihan Kebijakan Dalam Mengatasi Hambatan Akses Terhadap Pendidikan Dasar. Studi Kasus Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cilincing. 2007-2009. *Tesis*. Program S2 Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Jakarta.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet :

www.tnp2k.go.id (diakses Selasa, 17 Januari, 2017, 13:00 WIB).

<https://semarangkota.bps.go.id> (diakses Selasa, 17 Januari, 2017, 13:30 WIB).

<http://simgakin.semarangkota.go.id> (diakses Selasa, 17 Januari, 2017, 13:45 WIB).

<http://uppkhjateng.blogspot.co.id/2016/11/sejarah-singkat-pkh-provinsi-jawa-tengah.html> (diakses Senin, 19 Desember, 2016, 11:13 WIB).

www.kemensos.go.id (diakses Selasa, 17 Januari, 2017, 12:45 WIB).

Kemiskinan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (diakses Selasa, 17 Januari, 2017, 13:15 WIB).

www.scholar.google.com (diakses Kamis, 23 Maret, 2017, 17:37 WIB).